

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 27 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);

5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);

- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor);
- 26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

- a. Pendapatan
 - 1. Pendapatan Asli Daerah Rp772.488.538.477,28
 - 2. Pendapatan Transfer Rp3.541.724.361.770,00
 - 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp150.422.180.250,00
 - Jumlah Pendapatan Rp4.464.635.080.497,28
- b. Belanja
 - 1. Belanja Operasi :
 - a). Belanja Pegawai Rp1.849.376.765.355,00
 - b). Belanja Barang dan Jasa Rp1.331.187.948.343,00
 - c). Belanja Bunga Rp0,00
 - d). Belanja Subsidi Rp0,00
 - e). Belanja Hibah Rp218.601.651.803,00
 - f). Belanja Bantuan Sosial Rp11.393.180.000,00
 - Jumlah Belanja Operasi Rp3.410.559.545.501,00
 - 2. Belanja Modal :
 - a). Belanja Tanah Rp0,00
 - b). Belanja Peralatan dan Mesin Rp148.888.092.294,00
 - c). Belanja Gedung dan Bangunan Rp115.833.547.378,00

d). Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp213.012.113.581,00
e). Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp1.033.404.300,00
Jumlah Belanja Modal	Rp478.767.157.553,00
3. Belanja Tidak Terduga :	Rp9.344.507.869,00
Jumlah Belanja (1+2+3)	Rp3.898.671.210.923,00
c. Transfer	
1. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	Rp34.252.775.007,00
2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Rp675.632.284.600,00
Jumlah Transfer (1+2)	Rp709.885.059.607,00
Jumlah Belanja dan Transfer (b+c)	Rp4.608.556.270.530,00
Surplus / (Defisit) (a-(b+c)	(Rp143.921.190.032,72)
d. Pembiayaan	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp224.475.499.831,21
2. Pengeluaran Pembiayaan	(Rp0,00)
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp224.475.499.831,21
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	80.554.309.798,49

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



IYAN EDIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 27



KABUPATEN CIREBON
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TA 2024



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	4.594.260.243.982,00	4.464.635.080.497,28	(129.625.163.484,72)	97,18
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	853.032.201.954,00	772.488.538.477,28	(80.543.663.476,72)	90,56
4.1.01	Pajak Daerah	370.540.327.246,00	348.566.584.116,00	(21.973.743.130,00)	94,07
4.1.02	Retribusi Daerah	437.738.050.280,00	385.446.568.081,28	(52.291.482.198,72)	88,05
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.660.587.939,00	14.683.818.841,00	23.230.902,00	100,16
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.093.236.489,00	23.791.567.439,00	(6.301.669.050,00)	79,06
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	853.032.201.954,00	772.488.538.477,28	(80.543.663.476,72)	90,56
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.741.228.042.028,00	3.692.146.542.020,00	(49.081.500.008,00)	98,69
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.180.169.257.442,00	3.142.049.119.624,00	(38.120.137.818,00)	98,80
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	561.058.784.586,00	550.097.422.396,00	(10.961.362.190,00)	98,05
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	561.058.784.586,00	550.097.422.396,00	(10.961.362.190,00)	98,05
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	3.741.228.042.028,00	3.692.146.542.020,00	(49.081.500.008,00)	98,69
	JUMLAH PENDAPATAN	4.594.260.243.982,00	4.464.635.080.497,28	(129.625.163.484,72)	97,18
5	BELANJA DAERAH	4.818.735.743.813,00	4.608.556.270.530,00	(210.179.473.283,00)	95,64
5.1	BELANJA OPERASI	3.573.233.009.852,00	3.410.559.545.501,00	(162.673.464.351,00)	95,45
5.1.01	Belanja Pegawai	1.906.934.743.405,00	1.849.376.765.355,00	(57.557.978.050,00)	96,98
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.433.049.594.705,00	1.331.187.948.343,00	(101.861.646.362,00)	92,89
5.1.05	Belanja Hibah	221.593.266.742,00	218.601.651.803,00	(2.991.614.939,00)	98,65
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.655.405.000,00	11.393.180.000,00	(262.225.000,00)	97,75
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.573.233.009.852,00	3.410.559.545.501,00	(162.673.464.351,00)	95,45
5.2	BELANJA MODAL	514.135.348.073,00	478.767.157.553,00	(35.368.190.520,00)	93,12
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.761.261.854,00	148.888.092.294,00	(21.873.169.560,00)	87,19
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.999.159.098,00	115.833.547.378,00	(8.165.611.720,00)	93,41
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	218.334.605.821,00	213.012.113.581,00	(5.322.492.240,00)	97,56
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.040.321.300,00	1.033.404.300,00	(6.917.000,00)	99,34
	JUMLAH BELANJA MODAL	514.135.348.073,00	478.767.157.553,00	(35.368.190.520,00)	93,12
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.155.305.600,00	9.344.507.869,00	(5.810.797.731,00)	61,66
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.155.305.600,00	9.344.507.869,00	(5.810.797.731,00)	61,66
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	15.155.305.600,00	9.344.507.869,00	(5.810.797.731,00)	61,66
5.4	BELANJA TRANSFER	716.212.080.288,00	709.885.059.607,00	(6.327.020.681,00)	99,12
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	39.907.478.888,00	34.252.775.007,00	(5.654.703.881,00)	85,83
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	676.304.601.400,00	675.632.284.600,00	(672.316.800,00)	99,90
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	716.212.080.288,00	709.885.059.607,00	(6.327.020.681,00)	99,12
	JUMLAH BELANJA	4.818.735.743.813,00	4.608.556.270.530,00	(210.179.473.283,00)	95,64
	SURPLUS/DEFISIT	(224.475.499.831,00)	(143.921.190.032,72)	80.554.309.798,28	64,11
6	PEMBIAYAAN DAERAH	224.475.499.831,00	224.475.499.831,21	0,21	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	224.475.499.831,00	224.475.499.831,21	0,21	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	184.475.499.831,00	184.475.499.831,21	0,21	100,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	224.475.499.831,00	224.475.499.831,21	0,21	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	224.475.499.831,00	224.475.499.831,21	0,21	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	80.554.309.798,49	80.554.309.798,49	0,00

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON



KABUPATEN CIREBON
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TA 2024



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	4.594.260.243.982,00	4.464.635.080.497,28	(129.625.163.484,72)	97,18
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	853.032.201.954,00	772.488.538.477,28	(80.543.663.476,72)	90,56
4.1.01	Pajak Daerah	370.540.327.246,00	348.566.584.116,00	(21.973.743.130,00)	94,07
4.1.02	Retribusi Daerah	437.738.050.280,00	385.446.568.081,28	(52.291.482.198,72)	88,05
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.660.587.939,00	14.683.818.841,00	23.230.902,00	100,16
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.093.236.489,00	23.791.567.439,00	(6.301.669.050,00)	79,06
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	853.032.201.954,00	772.488.538.477,28	(80.543.663.476,72)	90,56
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.741.228.042.028,00	3.692.146.542.020,00	(49.081.500.008,00)	98,69
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.180.169.257.442,00	3.142.049.119.624,00	(38.120.137.818,00)	98,80
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	561.058.784.586,00	550.097.422.396,00	(10.961.362.190,00)	98,05
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	561.058.784.586,00	550.097.422.396,00	(10.961.362.190,00)	98,05
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	3.741.228.042.028,00	3.692.146.542.020,00	(49.081.500.008,00)	98,69
	JUMLAH PENDAPATAN	4.594.260.243.982,00	4.464.635.080.497,28	(129.625.163.484,72)	97,18
5	BELANJA DAERAH	4.818.735.743.813,00	4.608.556.270.530,00	(210.179.473.283,00)	95,64
5.1	BELANJA OPERASI	3.573.233.009.852,00	3.410.559.545.501,00	(162.673.464.351,00)	95,45
5.1.01	Belanja Pegawai	1.906.934.743.405,00	1.849.376.765.355,00	(57.557.978.050,00)	96,98
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.433.049.594.705,00	1.331.187.948.343,00	(101.861.646.362,00)	92,89
5.1.05	Belanja Hibah	221.593.266.742,00	218.601.651.803,00	(2.991.614.939,00)	98,65
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.655.405.000,00	11.393.180.000,00	(262.225.000,00)	97,75
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.573.233.009.852,00	3.410.559.545.501,00	(162.673.464.351,00)	95,45
5.2	BELANJA MODAL	514.135.348.073,00	478.767.157.553,00	(35.368.190.520,00)	93,12
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.761.261.854,00	148.888.092.294,00	(21.873.169.560,00)	87,19
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.999.159.098,00	115.833.547.378,00	(8.165.611.720,00)	93,41
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	218.334.605.821,00	213.012.113.581,00	(5.322.492.240,00)	97,56
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.040.321.300,00	1.033.404.300,00	(6.917.000,00)	99,34
	JUMLAH BELANJA MODAL	514.135.348.073,00	478.767.157.553,00	(35.368.190.520,00)	93,12
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.155.305.600,00	9.344.507.869,00	(5.810.797.731,00)	61,66
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.155.305.600,00	9.344.507.869,00	(5.810.797.731,00)	61,66
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	15.155.305.600,00	9.344.507.869,00	(5.810.797.731,00)	61,66
5.4	BELANJA TRANSFER	716.212.080.288,00	709.885.059.607,00	(6.327.020.681,00)	99,12
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	39.907.478.888,00	34.252.775.007,00	(5.654.703.881,00)	85,83
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	676.304.601.400,00	675.632.284.600,00	(672.316.800,00)	99,90
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	716.212.080.288,00	709.885.059.607,00	(6.327.020.681,00)	99,12
	JUMLAH BELANJA	4.818.735.743.813,00	4.608.556.270.530,00	(210.179.473.283,00)	95,64
	SURPLUS/DEFISIT	(224.475.499.831,00)	(143.921.190.032,72)	80.554.309.798,28	64,11
6	PEMBIAYAAN DAERAH	224.475.499.831,00	224.475.499.831,21	0,21	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	224.475.499.831,00	224.475.499.831,21	0,21	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	184.475.499.831,00	184.475.499.831,21	0,21	100,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	224.475.499.831,00	224.475.499.831,21	0,21	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	224.475.499.831,00	224.475.499.831,21	0,21	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	80.554.309.798,49	80.554.309.798,49	0,00

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01.2.09.0009	5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01.2.09.0009	5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01.2.09.0009	5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75		
				JUMLAH BELANJA	81.174.491.468,00	80.767.635.033,00	(406.856.435,00)	99,49		
				SURPLUS DEFISIT	(81.174.491.468,00)	(80.767.635.033,00)	406.856.435,00	99,49		

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01.2.09.0009	5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01.2.09.0009	5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01.2.09.0009	5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75		
				JUMLAH BELANJA	81.174.491.468,00	80.767.635.033,00	(406.856.435,00)	99,49		
				SURPLUS DEFISIT	(81.174.491.468,00)	(80.767.635.033,00)	406.856.435,00	99,49		

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON